BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Situbondo, tema RKPD pada tahun 2021 adalah **“ Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, Reformasi Birokrasi, dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Melalui Integritasi Pariwisata dan Sektor Unggulan “. Dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut :**

1. Meningkatkan daya saing kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo yang berkeadilan melalui jaminan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
2. Membangunan Pengembangan Pariwisata berbasis ecotourism dengan mengintegrasikannya dumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Mengembangkan ekonomi unggulan melalui ekonomi kebersamaan berbasis potensi lokal
4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi terhadap system tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai wujud meningkatkan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan Tema Rancangan RKPD pada Tahun 2021, maka Kecamatan Jangkar menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Tahun 2021

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Organisasi Perangkat Daerah adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jangkar, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi Kepala Daerah dan Program Kecamatan Jangkar, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja PD merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, Renja PD merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Resntra PD. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA PD yang dilanjutkan dengan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Situbondo
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 38 tahun 2020

1.1. Maksud dan Tujuan

MAKSUD :

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jangkar adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Jangkar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021;

TUJUAN :

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jangkar adalah guna merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jangkar tahun 2021

1.2. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jangkar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi

dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan di tambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian SDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian NSPK dan SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar dalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Peangkat daerah Kecamatan Jangkar . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jangkarini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jangkar selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Jangkar dengan 13 program dan 48 kegiatan. Pada APBD Tahun Anggaran 2020 disediakan pagu anggaran untuk Kecamatan Jangkar sebesar **Rp. 2.788.589.107,00** terealisasi **Rp.2.171.041.337,00** atau mencapai **77,85 %** terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1,819,484,307,00** terealisasi **Rp.1,232,134,648.00** atau mencapai **67.72 %.**
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 969,104,800.00** terealisasi **Rp. 938,906,689.00** atau mencapai **96,88 %.**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Kabupaten Situbondo

Nama SKPD : **KECAMATAN JANGKAR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase tercapainya pelayanan Administrasi perkantoran**	100%	90,09%	**100**	100	95.85%	98,09%	98.09%	98.09%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1560	1,084	150	174	154.8 %	252	152	50.71%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan setahun	288	192	48	48	89.60%	48	12	25.00%
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	72	36	12	12	72.42%	12		0.00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang disediakan jasa administrasi keuangan	53	26	8	8	100.00%	8	7	87.50%

	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang disediakan	54	27	9	9	97.26%	9	9	23.81%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	78	39	13	13	99.69%	42	10	23.81%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30	13	5	3	99.83%	4	2	25.00%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang disediakan	18	12	4	4	100.00%	4	1	25.00%
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bahan bacaan dan peraturan perundang undanganr yang disediakan	18	9	3	3	94.57%	1	1	21.33%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis makanan dan minuman rapat yang disediakan	13560	5.385	2260	1.817	78.49%	1500	320	21.33%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	72	35	11	11	100.00%	10	6	0.00%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH) yang disediakan	126	65	21	17	80.95%	17	0	0.00%
	Pengadaan pakaiaan dinas Kemeja Putih	Jumlah Pakaian Dinas (Kemeja Putih) yang disediakan	21	-	0	-	0.00%	0	0	0.00%

	Pengadaan pakaiaan khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari hari terentu yang disediakan	126	21	21	-	0.00%	0	0	0.00%
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari besar keagamaan yang dilaksanakan	3360	1,873	1370	1,308	95.47%	1500	255	17.00%
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Nasioanal yang dilaksanakan	5280	1,760	880	880	100.00%	1070		0.00%
	Dukungan Penyelenggaraan Seribu Hadrah	Jumlah kegiatan seribu hadrah yang diselenggarakan	600	600	500	500	100.00%	180		0.00%
	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi	Jumlah kegiatan peringatan harjakaasi yang dilaksanakan	12	3	1	1	100.00%	1		0.00%
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penggunaan aplikasi	72	36	12	12	100.00%	12	3	25.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur	100%	100.00%	100%	99.43%	99.43%	100%	12.99%	12.99%
	Pembangunan gedung kantor	jumlah Pembangunan gedung kantor	7	0	0	-	0.00%	0	-	0.00%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	40	2	3	3	98.60%	0	-	0.00%
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli	2	0	0	-	0.00%	0	-	0.00%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	39	13	8	8	99.90%	4	3	48.76%

	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis meubeleur yang dibeli	112	1	2	2	98.73%	3	-	0.00%
	Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang mendapatkan pemeliharaan	6	1	1	1	100.00%	1	-	0.00%
	Pemeliharaan Rutin gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	6	1	1	1	100.00%	1	-	0.00%
	Peeliharaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	72	12	12	12	99.39%	12	12	18.23%
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	24	4	4	3	99.64%	4	2	9.51%
	Pemeliharaan berkala mebeleur	Jumlah jenis meubeleur yang terpelihara	18	3	3	3	98.67%	2	1	1.53%
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi sedang / berat gedungn kantor	2	2	1	1	99.36%	1	-	0.00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan kinerjayang disusun dengan benar dan tepat waktu**	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	24.29%	24.29%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip, perjanjian kinerja yang disusun	12	4	1	1	100%	1	1	100%

	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun	6	5	1	1	100%	1	-	0.00%
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang tersusun	6	12	1	1	100%	1	1	100%
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA, RKAP dan DPPA yang tersusun	24	1	4	4	100%	4	-	0.00%
	Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	5	2	1	1	100%	1	1	100%
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM yang disusun	4	1	1	1	100%	1	-	0.00%
	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	6	2	1	1	100%	1	-	0.00%
	Penyusunan RENJA KECAMATAN	Jumlah dokumen Renja yang disusun	12	4	2	2	100%	2	-	0.00%
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen Profil Kecamatan	6	2	1	1	100%	1	-	0.00%
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	**Persentase Desa Pelaporan ADD Tertib Administrasi ,baik dan tepat waktu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penunjang Program ADD	Jumlah desa binaan yang mengelola keuangan desa dengan benar dan tepat waktu	8	8	8	8	8	8	8	100%

	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase tercapainya Pembinaaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11.57%	11.57%
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%
	Pembinaan Kamtibnas dan Linmas	Jumlah desa yg rawan kriminal	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%
	Pembinaan dan monitoring Administrasi PBB	Jumlah desa yang memungut PBB	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%
	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah desa yg melaksanakan kegiatan BBGRM	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.	600	300	100	100	100%	100	100	100%
	Fasilitasi perencanaan pembangunan desa	Julmlah Desa yang menyelenggarkan perencanaan pembangunan desa	8				0.00%	8		0.00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin Raskin	8	8	8	8	100%	8	-	0.00%

	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Ormas dan PKK Desa yang Aktif dlm organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.21%	6.21%
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakata yang dibina	4	4	4	4	100%	4	-	0.00%
	Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM Kecamatan Jangkar yang dibina	16				100%	16	-	0.00%
	Fasilitasi Kelompok Sadar Wisata	umlah Kelompok Sadar Wisata yang terbentuk	8				100%	8	-	0.00%
	Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah TP.PKK Desa yang dibina / diberdayakan	8	8	8	8	100%	8	8	100%
	Fasilitasi Forom Layak Anak	Jumlah forum layak anak desa yang dibina	8				100%	8	-	0.00%
	Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran yang dikuti	4				100%	4	-	0.00%
	Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Tanggap Darurat Bencana	360				100%	360	90	25.00%
	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pokja Desa Sehat	8	8	8	8	100%	8	8	100%
	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilyah ibukota kecamatan	Jumlah lingkungan bersih, indah dan tertib	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Pelaksanaan TKPK Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun	5	2	2	2	100%	5	-	0.00%

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jangkar masih terdapat kendala-kendala, yang mana berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini dapat dllihat pada Tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1 Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja

Sesuai dengan Program / Kegiatan di DPA tahun 2020 , berdasarkan **Hasil Capaian Kinerja Keuangan** terdapat 5 Program yang tidak memenuhi target 100 % , sabagaimana tabel berikut :

Tabel . 2.2 : **Program/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja**

Kode	Program / Kegiatan	Kinerja Program dan kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	90,91 %	90,91 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	88,89 %	88,89 %
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100%	50 %	50 %
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	75 %	75 %
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan masyarakat pada musrenbang Tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD	70 %	44,32 %	63,18 %

Berdasarkan **Hasil Capaian Kinerja Program, 5 (lima) terdapat** Program yang tidak memenuhi target .

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Jangkar Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi target kinerja terdiri dari 8 program, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.2 Program Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Keuangan

Tabel . 2.3 : Program Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Keuangan

Kode	Program / Kegiatan	Kinerja Program dan kegiatan			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
3.	Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
4.	Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi	Prosentase Penyediaan Dukungan Data/ Informasi	100%	100%	100%
5.	Program Pelaksanaan Harjakasi	Prosentase Pelaksanaan Harjakasi	100%	100%	100%
6	Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	Prosentase Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	100%	100%	100%
7	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Persentase tercapaianya Penataan Daerah otonomi Baru	100%	100%	100%
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Tercapainya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100%	100%	100%

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Jangkar Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari 13 program , tidak terdapat program yang melebihi target kinerja keuangan.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Tercapainya dan tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo disebabkan oleh :

- Realisasi Program/Kegiatan pada Kecamatan Jangkar Kabupaten Tahun Anggaran 2020 yang memenuhi target 100 % sebanyak 8 program disebabkan realisasi anggaran sesuai dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan target yang telah ditetapkan .

- Realisasi Program yang tidak memenuhi target adalah pada sebanyak 5 (lima) Program disebabkan natara laian :

  1. Kurangnya koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan Desa
  2. Keterbatasan SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan
  3. Kurangnya koordinasi antara OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa pada Perencanaan Prioritas Pembangunan
  4. Keterlambatan Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes
  5. Kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas

- Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target Anggaran yang direncanakan , Kecamatan Jangkar tidak ada Program / Kegiatan yang melebihi target anggaran.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Jangkar

Implikasi yang timbul atas capaian program/kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Jangkar antara lain adalah :

a. Kecamatan Jangkar dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan.

b. Aparat Kecamatan dituntut bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

c. Pola kerja di Kecamatan Jangkar yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,efisien, dan efektif

d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional

sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

e. Penggunaan Aplikasi Pelayanan administrasi secara online antara Kecamatan dengan Desa

f. Saranan ruangan pelayanan yangn representatif.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil Kecamatan Jangkar

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Kecamatan Jangkar antara lain :

a. Perencanaan program kegiatan Keacamatan Jangkar secara konsisten mengacu pada Renstra PD yang telah tersusun selama lima tahun anggaran kecuali ada kegiatan atau program yang sangat urgent dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;

b. Proses penganggaran program/kegiatan Perangkat daerah diupayakan efesien, efektif, berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sesuai dengan kebutuhan kinerjanya

Perkiraan Maju Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan rencana Anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.290.420.150,00** terurai dalam **6** program dan **50** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuanga, realisasi fisik, realisasi kinerja.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Situbondo, pada dasarnya Visi Kepala Daerah adalah juga merupakan visi Kecamatan Jangkar , sedangkan Misi Kecamatan Jangkar sesuai dengan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Jangkar Tahun 2016 – 2021 tertuang pada Misi Kelima Kabupaten Situbondo yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat , sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jangkar adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Jangkar. Tercapainya sasaran tersebut diukur dengan indikator sasaran yaitu Hasil Survey IKM Kecamtan Jangkar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jangkar . maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Jangkar yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur serta stakeholders sebagai berikut:

- Minimalnya tenaga fungsional umum (staf) di masing - masing seksi .
- Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan dibidang Informasi Tekhnologi (IT) dan mengoperasionalkan komputer

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jangkar dalam pelaksanaannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN JANGKAR merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi,Uraian Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, KECAMATAN JANGKAR mempunyai kedudukan dan susunan organisasi:

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

(2) **Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah**.

a. Camat ;

b. Sekretariat, membawahi :

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

e. Seksi Kesejateraan Rakyat;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Jangkar dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

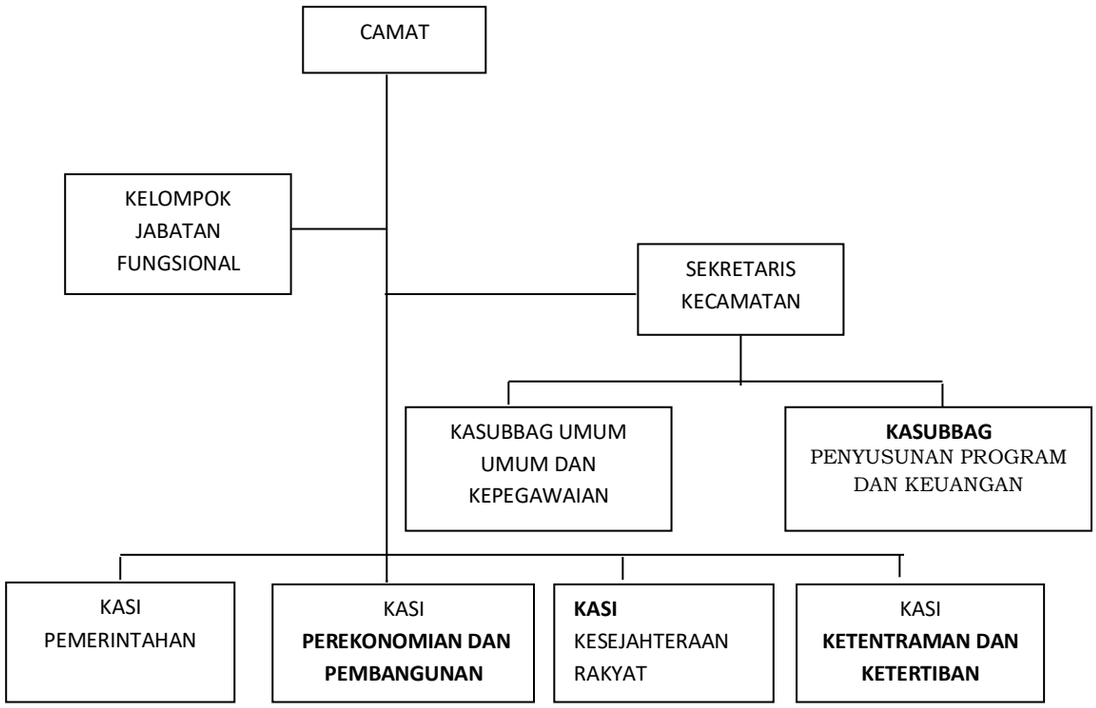

Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Jangkar mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. *Camat* mempunyai tugas :

   a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
   b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
   e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
   h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
   i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

   Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

   Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada) dibantu oleh perangkat kecamatan camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. *Sekretaris Kecamatan* mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.
   Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
b. penyiapan rencana kegiatan;
c.penyiapan rencana kebutuhan kantor;
d. penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
e. pengelolaan urusan keuangan;
f. pembuatan laporan keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) *Seksi Pemerintahan*, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;

b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa ;

c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;

d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;

e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

(3) *Seksi Perekonomian dan Pembangunan* mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;

b. penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;

c. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;

d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;

e. penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;

f. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;

g. pembinaan pelayanan umum;

h. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;

i. penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

(4) Seksi Kesejateraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejateraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;

b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;

c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;

d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;

e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) *Seksi Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;

b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;

c.penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;

d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;

e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;

f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;

g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM Kecamatan Jangkar sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jangkar

Kabupaten Situbondo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar			B (80,54)	B (83,29)	B (86,53)	A (88,6)	B (87,75)	B (85,63)	B (83,29)	A (88,6)	
2	Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik			100%	100%	100%	100%	37,5 %	75 %	100%	100%	
3	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masukpada RKPD			70 %	80 %	90 %	100 %	94,74 %	44,23 %	80 %	90 %	

Adanya perubahan Renstra pada tahun 2020, yang pada awalnya Kecamatan Jangkar dibebani sasaran strategis pada anggaran tahun 2020 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator, pada perubahan berubah menjadi 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator..

Dari ketiga indikator tersebut pada tahun 2020 , indikator Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik dan Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masukpada RKPD belum tercapai , hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan Desa
2. Keterbatasan SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan
3. Kurangnya koordinasi antara OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa pada Perencanaan Prioritas Pembangunan
4. Keterlambatan Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes
5. Kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas

Indikator tidak memenuhi target trdiri dari 2 indikator yaitu :

1. indikator Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik , target 100 % dan terealisasi 75 % dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 75 %

2. Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masukpada RKPD , target 70% dan terealisasi 44,23 % dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 44.23 %

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Analisa terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Analisa terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

I. Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar	B (80,54)	B (87,75)	B (85,63)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar	B (80,54)	B (85,63)	Sangat berhasil = 106,36 % Diatas target (lebih 6,36 %)

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar, target B (80,54) dan terealisasi B (85,63) dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 106,36 % dengan kategori sangat berhasil melebihi target sebesar 6,36 % .

- Target pada tahun 2017 , B (77,36) realisasi B (87,75), pencapaian target kinerja 113.43 %

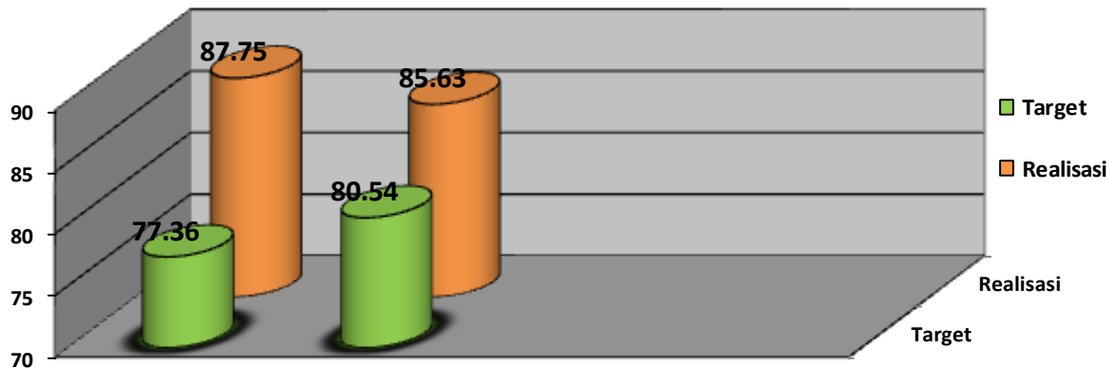

Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar dengan indikator Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar tidak ada hambatan/ permasalahan.

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Jangkar adalah sebesar 85,63 (Kategori Baik) .

Nilail survey IKM sebesar 87.75 (Kategori Baik) melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 80,54 (Kategori baik) , dengan pencapaian target kinerja sebesar 106,36 % , walaupun telah melebihi target masih perlu adaya perhatian yanng serius dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui komitmen antara petugas pelayanan, Camat dan seluruh Stake Holder yang terlibat di Kecamatan Jangkar

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2018 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan , anggaran sebesar 87.902.500 dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja kegiatanPenyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, anggaran sebesar 1.050.000.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Jangkar dilakukan dengan memberikan Kuesioner kepada penerima layanan di Kecamatan Jangkar dan di 8 Desa se Kecamatan Jangkar.

II. Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	37,5 %	75 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik	100%	75 %	cukup berhasil =75 % Masih Di bawah target (kurang 25 %)

Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik, dengan target 100 % dan Realisasi 75 % dengan capaian kinerjanya sebesar 75 % dengan kategori cukup berhasil 75 % Masih Di bawah target kurang 25 %

Target pada tahun 2017 :100 % , realisasi 37.5 % , pencapaian target kinerja 37.5 %

Persentase Desa Dengan Pelaporan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik

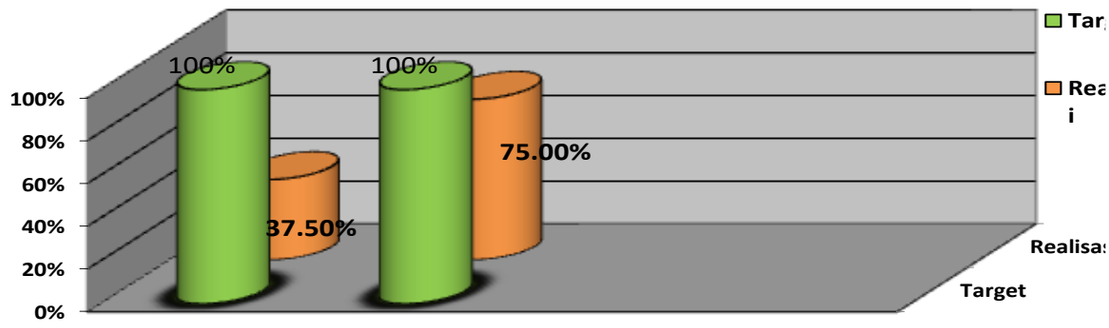

Pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikator Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik, dengan target 100 % dan Realisasi 75 % dengan capaian kinerjanya sebesar 75 % dengan kategori cukup berhasil 75%, Masih Di bawah target kurang 25%.

Pelaporan Keuangan Desa Se Kecamatan Jangkar sejumlah 8 Desa hanya 6 Desa yang mencapai Pelaporan Keuangan Desa dengan Tertib dan baik sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 yaitu Desa Sumberkolak, Desa Alasmalang dan Desa Peleyan, Desa Wringinanom, Desa Kilensari, Desa Gelung .

Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik, didukung Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan Verivikasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa , anggaran sebesar 22.920.000 dan Program pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan , kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesebesar 1.650.000

Hambatan dan permasalahan tidak tercapainya Pelaporan Keuangan Desa dengan Tertib dan baik :

1. Realisasi pencairan keuangan desa mendekati akhir Tahun Anggaran 2020 sehingga pelaporan Keuangan Desa tidak bisa tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.

   Namun Tim Pendamping Kecamatan Jangkar juga melaksanakan pendampingan monitoring / Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan Jangkar agar pelaporan keuangan desa baik dan tidak ada sanksi bagi Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan tambahan batasan waktu pelaporan keuangan Desa .

2. Kurangnya Koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan Desa
3. Keterbatasan SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun langkah – langkah rencana aksi peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jangkar :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Rutin dan Berkala setiap dua bulan sekali.
2. Perjanjian / komitmen antara camat dengan Kepala Desa
3. Merubah perilaku aparatur Desa/ Tim Pengelola Keuangan Desa untuk tertib administrasi dan tidak menunda pekerjaan.

III. Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	70%	94,74 %	44.23%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	70%	44.23%	kurang berhasil = 63,18 % Masih dibawah target Masih Di bawah target (kurang 36,82 %)

Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD target 70% dan terealisasi 44,23 % dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 63,18 %, Masih di bawah target kurang 36,82 %

Pada tahun 2017 : Target 60 % , realisasi 94,74 % , pencapaian target kinerja 157,%

Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

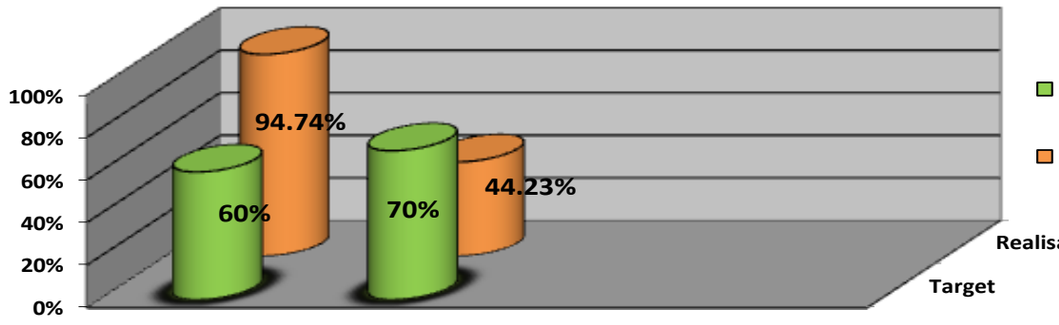

Pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD . Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD target 70% dan terealisasi 44,23 % dengan tingkat pencapaian terget kinerja sebesar 63,18 %, Masih di bawah target kurang 36,82 %

Hambatan dan permasalahan tidak tercapainya Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD :

1. Kurangnya koordinasi antara OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa pada Perencanaan Prioritas Pembangunan
2. Keterrlambatan Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes
3. Kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas

Adapun langkah – langkah rencana aksi peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jangkar :

1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Prioritas Pembangunan OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa

Fasilitasi Perencanaan pembangunan Desa, Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes tepat waktu dan berkualitas.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH / AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar	A (88,60)	B (87,75)	Kurang 0.96 %
		Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik	100 %	37.5 %	Kurang 62.5 %
		Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan 100%	100 %	0 %	Kurang 100 %
		Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk dalam RKPD	90 %	94,74 %	Lebih 4.74 %

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

i. **Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar dengan indikator Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar.**

Realisasi pada tahun 2020 telah memenuhi dan melebihi target. Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Jangkar adalah sebesar 85,63 (Kategori Baik) .

Nilai survey IKM sebesar 85,63 (Kategori Baik) melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 80,54 (Kategori baik) , dengan pencapaian target kinerja sebesar 106,36 %.

Perbandingan Realiasi tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Jangkar sampai akhir periode renstra tahun 2021 sebesar A (88, 60) dicapai tingkat kemajuan 96, 64 %.

Penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah telah dilakukan pada indikator Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jangkar pada tahun 2018 adalah :

a. Penggunaan Aplikasi Paten (E- PAMANDHI) secara online 24 jam antara Kecamatan dengan Desa

b. Penyediaan Ruang Pelayanan Kecamatan dan Desa yang representatif.

c. Kecamatan Jangkar menyajikan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas yang memadai antara lain :

- Petugas PATEN yang Ramah dan kompeten ;
- Responsif terhadap kebutuhan Pelayanan Masyarakat ;
- Tersedia informasi pelayanan, saran dan pengaduan melaui Facebook
- Brosur persyaratan pelayanan;
- Meja pelayanan yang sangat representatif untuk pelayanan;
- Kejelasan prosedur pelayanan;
- Kejelasan lamanya pelayanan (Pelayanan Cepat) dan tidak dipungut biaya ;
- Ruang tunggu yang representatif (Televisi, Koran dan minum gratis);
- Adanya kotak saran dan survei kepuasan pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan :

a. Walaupun telah melebihi target pada tahun 2017 , Kecamatan Jangkar masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai target akhir renstra melalui inovasi yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
2. Menambah jam pelayanan (satu minggu full) yaitu pada hari :
   - Jumat : 13.00 – 16.00 WIB
   - Sabtu dan Minggu : 08.00 – 11.00 WIB
3. Survey Kepuasan Masyarakat secara online antara Desa dan Kecamatan

b. Upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui komitmen antara petugas pelayanan, Camat dan seluruh Stake Holder yang terlibat di Kecamatan Jangkar untuk memeberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

2. Pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan baik

Realisasi pada tahun 2020 belum memenuhi target dari target 100 % Kecamatan Jangkar hanya mencapai Realisasi 75 %.

Perbandingan Realiasi tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Jangkar sampai akhir periode rentra tahun 2021 dicapai tingkat kemajuan 75 %.

Penyebab kegagalan serta alternatif solusi yang telah telah dilakukan pada indikator Persentase Desa dengan pelaporan keuangan Desa yang tertib dan baik Kecamatan Jangkar pada tahun 2020 adalah :

a. Pelaporan Keuangan Desa Se Kecamatan Jangkar sejumlah 8 Desa hanya 6 Desa yang mencapai Pelaporan Keuangan Desa dengan Tertib dan baik sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 yaitu Desa Jangkar, Desa Palangan dan Desa Pesanggerahan, Desa Sopet, Desa Gadingan, Desa Agel.
b. Realisasi pencairan keuangan desa mendekati akhir Tahun Anggaran 2020 sehingga pelaporan Keuangan Desa tidak bisa tepat waktu atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 31 Januari 2020.
c. Kurangnya Koordinasi antara Tim Pengelola Keuangan Desa
d. Keterbatasan SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan

a. Tim Pendamping Kecamatan Jangkar juga melaksanakan pendampingan monitoring Pengelolaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desaa se Kecamatan Jangkar agar pelaporan keuangan desa baik dan tidak ada sanksi bagi Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan tambahan batasan waktu pelaporan keuangan Desa.
b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Rutin dan Berkala setiap dua bulan sekali
c. Perjanjian / komitmen antara Camat dengan Kepala Desa untuk peningkatan kinerja di masing masing Desa
d. Pendampingan dan monitoring Penggunaan Aplikasi dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat.
e. Merubah perilaku Aparatur Desa / Tim Pengelola Keuangan Desa untuk tertib administrasi dan tidak menunda pekerjaan

3. Pada sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD

Realisasi pada tahun 2020 telah memenuhi dan melebihi target dari target 70 % , Kecamatan Jangkar mencapai Realisasi 44,23 %.

Perbandingan Realiasi tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Jangkar sampai akhir periode renstra tahun 2021 sebesar 100% dicapai tingkat kemajuan 44,23 % .

Indikator Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD pada tahun 2021 dan 2021 ditiadakan diganti dengan indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

Penyebab kegagalan indikator Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD pada tahun 2020 dibandingkan dengan target sampai akhir periode renstra tahun 2021 adalah :

1. Indikator Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD pada tahun 2021 dan 2021 ditiadakan diganti dengan indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
2. Kurangnya koordinasi antara OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa pada Perencanaan Prioritas Pembangunan
3. Keterrlambatan Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes
4. Kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas.
5. Kurangnya SDM Aparatur Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dan penentuan skala Prioritas Desa.

Adapun langkah – langkah rencana aksi peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jangkar :

1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Prioritas Pembangunan OPD Teknis dengan Kecamatan dan Desa

2. Fasilitasi Perencanaan pembangunan Desa, Pelaksanaan Musdes dan Penyusunan RKPDes tepat waktu dan berkualitas.

3. Tim Pendamping / Delegasi Kecamatan Jangkar melaksanakan pembinaan dan pendampingan di masing masing Desa se Kecamatan Jangkar agar Desa dapat mengusulkan rencana pembangunan skala kabupaten sesuai prioritas dan tepat waktu.

Masing – masing Desa se Kecamatan Jangkar telah mengusulkan kegiatan prioritas pada Musrenbang Kecamatan dengan benar dan tepat waktu.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN JANGKAR

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Situbondo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jangkar, sebagai berikut :

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK)

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6) Rendahnya keterwakilan Perempuan pada pengambilan Keputusan

7) Pengembangan Destinasi wisata Baru yang integratif denga Potensi masing – masing Desa untuk mendukung Tahun Kunjugan Wisata 2019

8) Meningkatkan Peran disabilitas dan Anak pada Rencana Pembangunan

9) Adanya tuntutan Pembangunan , Pelayanan Kecamatan Ramah Anak dan Fasilitas untuk disabilitas .

10) Tuntutan Pemberdayaan Masyarakat , UMKM, untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat dan Penunjang Ekonomi Rakyat

11) Meningkatkan Pelestarian lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana Alam

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

. 2.3.2 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jangkar, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan Jangkar yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur serta stakeholders sebagai berikut:

a. Minimalnya tenaga fungsional umum (staf) di masing - masing seksi dan bahkan pada Sekretariat tidak memiliki tenaga fungsional umum (staf).

b. Rendahnya SDM Aparatur Kecamatan dibidang Informasi Tekhnologi (IT) dan mengoperasionalkan komputer

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti SPM Dan MDGS (*Millenium Development Goals*)

Diperlukan sebuah perencanaan program yang komprehensif dan suistanable/berkelanjutan terkait peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah baik dari sisi kemampuan teknoratis, kedisiplinan, kepekaan/responsiveness, serta keberanian dan semangat untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar semua kegiatan yang dilaksanakan efektif, efisien, tepat sasaran dan partisipasif sehingga mencapai ekspektasi capaian kinerja yang diharapkan.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Penyusunan Renstra PD dan Renja PD Kecamatan Jangkar memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi telah mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja PD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGS) adalah :

1. Pembangunan yang menjaga
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
4. Kualitas lingkungan hidup
5. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

2.3.4 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN SKPD

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Jangkar menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Tuntutan implementasi peningkatan pelayanan kecamatan kepada masyarakat merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jangkar untuk untuk meningkatkan kinerja serta Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus

benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2. Tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK)

Sedangkan Peluang yang dihadapi Kecamatan Jangkar menghadapi sebagai berikut :

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tertata dengan baik.
2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Situbondo
3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
5) Ditetapkannya RPJPMD Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

Letak Geogrgafis Kantor Kecamatan Jangkar yangn merupakan Jalur Pantura menuju Pulau Bali sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam meng akses sarana Internet guna peningkatan pelayanan Pelayan Publik

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia Kecamatan Jangkar serta membangubn tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di kecamatan Jangkar. Ke depan diharapkan Kecamatan Jangkar menyediakan ruangan PATEN yang lebih respresentatif dan Penggunaan Aplikasi Pelayanan administrasi secara online antara Kecamatan dengan Desa

2.3.5 FORMULASI ISU-ISU PENTING BERUPA REKOMENDASI DAN CATATAN YANG STRATEGIS UNTUK DITINDAKLANJUTI DALAM PERUMUSAM PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN YANG DIRENCANAKAN

Perencanaan Pembangunan Daerah perlu disokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pada Kecamatan Jangkar sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni :

1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang menggunakan Tekhnologi Informasi Komputer (TIK) kepada masyarakat.
2) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Desa.
3) Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5) Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
6) Melibatkan keterwakilan perempuan, Disabilitas dan Anak pada Musyawarah rencana Pembangunan Kecamatan.
7) Pelayanan dan Pembangunan yang ramah anak dan disabilitas
8) Pelestarian lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan peran FKKS, Desa Sehat dan masyarakat
9) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan UMKM sebagai pengungkit ekonomi rakyat
10) Mengoptimalkan Tim Tagana Kecamatan Dan Desa pada Penanggulangan Bencana

11) Memotivasi Desa yang bersinergi dengan BUMDES untuk berinovasi menciptakan Destinasi wista baru yang integratif dengan Potensi masing- masing Desa

2.4 REVIU TERHADAP RANWAL PD

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Kecamatan Jangkar sesuai tabel sebagai berikut

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Situbondo (Tahun Rencana)

Nama SKPD : KECAMATAN JANGKAR

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Jangkar	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	451.971.500 ,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Jangkar	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	451.971.500 ,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jangkar	Jumlah Surat yang terkirim	608 surat	3.040.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jangkar	Jumlah Surat yang terkirim	608 surat	3.040.000,00	
	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Dan Listik	Kec. Jangkar	Jumlah Rekenig yang dibayarkan	48 rekening	48.600.000,00	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Dan Listik	Kec. Jangkar	Jumlah Rekenig yang dibayarkan	48 rekening	48.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kec. Jangkar	Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar	12 Unit	4.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kec. Jangkar	Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar	12 Unit	4.150.000	

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Pengelola keuangan yang terbayar	8 Orang	84.660.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Pengelola keuangan yang terbayar	8 Orang	84.660.000,00	
	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan	9 Orang	107.631.500,00	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan	9 Orang	107.631.500,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	32 Jenis	15.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	32 Jenis	15.000.000,00	
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	11.730.000,00	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	11.730.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis komponen listrik yang tersedia	4 Jenis	22.100.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis komponen listrik yang tersedia	4 Jenis	22.100.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jangkar	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 jenis	5.520.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jangkar	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 jenis	5.520.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Jangkar	Jumlah Peserta Rapat yang dilaksanakan	1.480 orang	19.800.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Jangkar	Jumlah Peserta Rapat yang dilaksanakan	1.480 orang	19.800.000,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	12 orang	94.740.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	12 orang	94.740.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Jangkar	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	20 stel	5.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Jangkar	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	20 stel	5.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	30.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	30.000.000,00	

	HARJAKASI		harjakasi					harjakasi			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Jangkar	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana	100%	960.450.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Jangkar	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana	100%	928.100.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	8 Unit	225.000.000 ,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	8 Unit	225.000.000 ,00	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	3 jenis	54.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	3 jenis	54.000.000,00	
	Pengadaan Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis meubeleur yang dibeli	5 jenis	44.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis meubeleur yang dibeli	5 jenis	44.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Jangkar	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 rumah	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Jangkar	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 rumah	5.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	7.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	7.500.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	20 unit	149.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	20 unit	149.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	17.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	17.500.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	3 jenis	8.450.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	3 jenis	8.450.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung	350.000.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung	350.000.000,00	

	kantor										
	Pemeliharaan Rutin berkala teman kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Taman yang di rpelihara	2 gedung	100.000.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 gedung	67.650.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Jangkar	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	49.792.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Jangkar	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	49.792.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen laporan Capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	6.896.0000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen laporan Capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	6.896.0000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun disusun	1 Laporan	2.680.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun disusun	1 Laporan	2.680.000,00	
	Penyusunan RKA dan DPA	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RKA dan DPA disusun	4 dokumen	15.855.000,00	Penyusunan RKA dan DPA	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RKA dan DPA disusun	4 dokumen	15.855.000,00	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan LPPD disusun	1 Laporan	3.151.000,00	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan LPPD disusun	1 Laporan	3.151.000,00	
	Penyusunan Renstra SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD disusun	1 dokumen	8.321.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD disusun	1 dokumen	8.321.000,00	
	Penyusunan Renja SKPD	Kec. Jangkar	jumlah Dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen	12.889.850,00	Penyusunan Renja SKPD	Kec. Jangkar	jumlah Dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen	12.889.850,00	

	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	, Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100%	212.892.500,00	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	, Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100%	175.452..500,00	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Pemohon pelayanan perijinan dan non perijinan yang diproses sesuai SOP	700 orang	192.892.500,00	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Pemohon pelayanan perijinan dan non perijinan yang diproses sesuai SOP	700 orang	156.452.500,00	
	Penyusunan IKM Kecamtaan	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan IKM yang disusun	1 Laporan	20.000.000,00	Penyusunan IKM Kecamtaan	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan IKM yang disusun	1 Laporan	20.000.000,00	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kec. Jangkar	1 Persentase Desa Pelaporan Keuangan Tertib, baik dan tepat waktu	100%	1.103.243.500	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kec. Jangkar	1Persentase Desa Pelaporan Keuangan Tertib, baik dan tepat waktu	100%	1.103.243.500	
			2, Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100%				2, Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100%		
	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan	24 rekomendasi	170.000.000,00	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan	24 rekomendasi	170.000.000,00	
	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian dan Pembangunan	24 rekomendasi	264.993.200,00	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian dan Pembangunan	24 rekomendasi	264.993.200,00	

	Koordinasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 rekomendasi	203.232.300,00	Koordinasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 rekomendasi	203.232.300,00	
	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban	24 rekomendasi	177.710.000,00	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban	24 rekomendasi	177.710.000,00	

Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 tersebut di atas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jangkar dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jangkar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan Jangkar. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2021. Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2021. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2021 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021.

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2021 pada Kecamatan Jangkar yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2021, dalam rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Situbondo

KECAMATAN JANGKAR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan Renja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada *kebijakan* dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Dearah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :

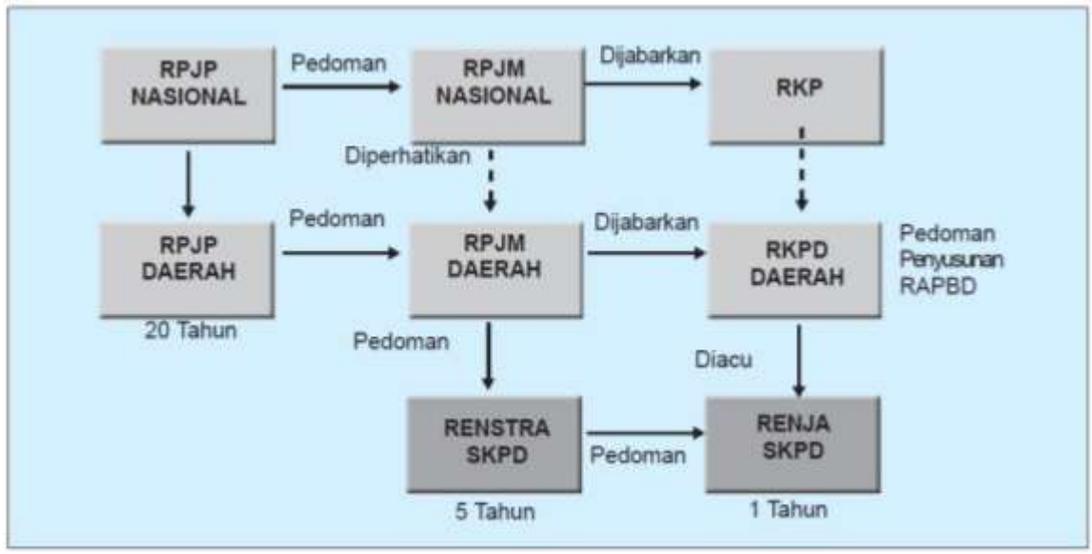

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Situbondo . Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Visi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2021 yaitu: **Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak.** Visi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2016-2021 yaitu **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong** dan

9(sembilan) Misi Pembangunan Nasional Tahun 2016-2021 yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) Mewujudkanpolitik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera, (5) Mewujudkan bangsa berdaya saing, (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nacional, (7) Mewujudkan masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Sedangkan Visi dari RPJMD Kabupaten Situbondo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI , MANDIRI SERTA LEBIH BERIMAN , SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**

Visi ini diwujudkan melalui misi yaitu:

(1) Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan

(2 Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera, dan berkeadilan

(3) Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal

(4) Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

" Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, Reformasi Birokrasi, dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Melalui Integritasi Pariwisata dan Sektor Unggulan ". Dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo yang berkeadilan melalui jaminan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
2. Membangunan Pengembangan Pariwisata berbasis ecotourism dengan mengintegrasikannya sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Mengembangkan ekonomi unggulan melalui ekonomi kebersamaan berbasis potensi local
4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi terhadap system tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai wujud meningkatkan kepuasan masyarakat

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD .

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Jangkar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tujuan **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemrintahan Kecamatan Jangkar Yang Baik**, adapun Tujuan tersebut merupakan sasaran pada RPJMD Kabupaten Situbondo. Indikator Tujuan **Nilai Survey Kecamatan Jangkar** .

Tujuan Renja Kecamatan Jangkar sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Jangkar adalah :

1. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.**
2. **MENINGNKTNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA**

Sasaran Renja Kecamatan Jangkar sesuai dengan renstra dan IKU Kecamatan Jangkar amempunyai 3 Indikator yaitu **:**

1. Nilai Surrvei IKM Kecamatan Jangkar
2. Persentase Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik.
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi yang diemban oleh suatu organisasi,maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Dan Listik
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah
- ✓ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- ✓ Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
- ✓ Pengadaan Mebeleur
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- ✓ Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin berkala teman kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- ✓ Penyusunan RKA dan DPA
- ✓ Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyusunan Renstra SKPD
- ✓ Penyusunan Renja SKPD

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan

- ✓ Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- ✓ Penyusunan IKM Kecamtaan

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- ✓ Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa
- ✓ Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa
- ✓ Koordinasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa
- ✓ Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Desa
- ✓ Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan di wilayah Kecamatan
- ✓ Dukungan Urusan Kesehatan di Wilayah Kecamatan
- ✓ Dukungan Pemeliharaan Pertamanan di Wilayah Kecamatan

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Situbondo

Nama SKPD : KECAMATAN JANGKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Jangkar	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	253.800.000 ,00	APBD		100%	347.700.000 ,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jangkar	Jumlah Surat yang terkirim	200 surat	2.000.000,00	APBD		200 surat	2.000.000,00
	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Dan Listik	Kec. Jangkar	Jumlah Rekenig yang dibayarkan	36 rekening	25.000.000,00	APBD		36 rekening	51.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kec. Jangkar	Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar	10 Unit	5.000.000	APBD		10 Unit	5.000.000

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Pengelola keuangan yang terbayar	6 Orang	30.900.000,00	APBD		6 Orang	30.900.000,00
	Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan	6 Orang	60.000.000,00	APBD		6 Orang	80.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	1 Paket	10.000.000,00	APBD		1 Paket	10.000.000,00
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	APBD		1 Paket	5.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis komponen listrik yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	APBD		1 Paket	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jangkar	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	24Exemplar	3.600.000,00	APBD		24Exemplar	3.600.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Jangkar	Jumlah Peserta Rapat yang dilaksanakan	500 orang	5.000.000,00	APBD		500 orang	5.000.000,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	100 Kali	12.300.000,00	APBD		100 Kali	60.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Jangkar	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	25 stel	5.000.000,00	APBD		25 stel	5.000.000,00

	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan PHBA	16 kegiatan	45.000.000,00	APBD		16 kegiatan	45.00.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan PHBN	1 kegiatan	20.00.000,00	APBD		1 kegiatan	20.00.000,00
	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan harjakasi	1 kegiatan	20.00.000,00	APBD		1 kegiatan	20.00.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Jangkar	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana	100%	217.946.241,00	APBD		100%	282.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	1 Paket	33.946.241,00	APBD		1 Paket	58.000.000,00
	Pengadaan Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis meubeleur yang dibeli	1 Paket	20.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Jangkar	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 rumah	10.000.000,00	APBD		1 rumah	10.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	24.000.000,00	APBD		1 Gedung	24.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	20 unit	110.000.000,00	APBD		20 unit	120.000.000,00

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	10.000.000,00	APBD		4 jenis	10.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	3 jenis	10.000.000,00	APBD		3 jenis	10.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Jangkar	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	25.000.000,00	APBD		100%	25.000.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen laporan Capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan Semesteran disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.000.000,00
	Penyusunan RKA dan DPA	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RKA dan DPA disusun	4 dokumen	5.000.000,00	APBD		4 dokumen	5.000.000,00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan LPPD disusun	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00

	Penyusunan Renstra SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD disusun	1 dokumen	3.000.000,00	APBD		1 dokumen	3.000.000,00
	Penyusunan Renja SKPD	Kec. Jangkar	jumlah Dokumen Renja yang disusun	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	, Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100%	65.000.000,00	APBD		100%	65.000.000,00
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Pemohon pelayanan perijinan dan non perijinan yang diproses sesuai SOP	700 orang	60.000.000,00	APBD		700 orang	60.000.000,00
	Penyusunan IKM Kecamtaan	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan IKM yang disusun	1 Laporan	5.000.000,00	APBD		1 Laporan	5.000.000,00
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kec. Jangkar	1 Persentase Desa Pelaporan Keuangan Tertib, baik dan tepat waktu 2, Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100%	460.000.000,00	APBD		100%	883.000.000,00
	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan	24 rekomendasi	150.000.000,00	APBD		24 rekomendasi	200.000.000,00

	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian dan Pembangunan	24 rekomendasi	110.000.000,00	APBD		24 rekomendasi	200.000.000,00
	Koordinasi, Pembinaan, dan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 rekomendasi	100.000.000,00	APBD		24 rekomendasi	100.000.000,00
	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban	24 rekomendasi	100.000.000,00	APBD		24 rekomendasi	100.000.000,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGJAT DAERAH

Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKPD)
Tahun 2021
Kecamatan Jangkar

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
30	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.602.700.000.00**
3008	**Kecamatan**				**1.602.700.000.00**
3008.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**253.800.000.00**
3008.300809.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jangkar	Jumlah surat yang terkirim	200 surat	2.000,000.00
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jangkar	Jumlah surat yang terkirim	200 surat	2.000,000.00
3008.300809.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jangkar	Jumlah rekening yang dibayarkan	36 rekening	25.000,000.00
001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jangkar	Jumlah rekening yang dibayarkan	36 rekening	25.000,000.00

3008.300809.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar	10 STNK	5.000,000.00
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah STNK Kendaraan yang terbayar	10 STNK	5.000,000.00
3008.300809.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jangkar	Jumlah tenaga keuangan yang terbayar	6 orang	30.900,000.00
001	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Jangkar	Jumlah tenaga keuangan yang terbayar	6 orang	30.900,000.00
3008.300809.01.005	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jangkar	JUmlah tenaga kebersihan dan keamanan	5 orang	60.000.000.00
001	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jangkar	JUmlah tenaga kebersihan dan keamanan	5 orang	60.000.000.00
3008.300809.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Jangkar	JUmlah Jenis ATK yang tersedia	1 Paket	10,000,000.00
001	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Jangkar	JUmlah Jenis ATK yang tersedia	1 Paket	10,000,000.00
3008.300809.01.007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	5.000,000.00
001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	5.000,000.00
3008.300809.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis komponen listrik yang tersedia	1 Paket	5.000,000.00
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis komponen listrik yang tersedia	1 Paket	5.000,000.00

3008.300809.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	24 Exemplar	3.600,000.00
001	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	24 Exemplar	3.600,000.00
3008.300809.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Jangkar	JUmlah peserta rapat yang dilaksanakan	500 orang	5.000,000.00
001	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Jangkar	JUmlah peserta rapat yang dilaksanakan	500 orang	5.000,000.00
3008.300809.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	100 Kali	12.300,000.00
001	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah	Kec. Jangkar	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	100 Kali	12.300,000.00
3008.300809.01.014	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Jangkar	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	25 stel	5,000,000.00
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Jangkar	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	25 stel	5,000,000.00
3008.300809.01.031	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	45,000,000.00
001	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	45,000,000.00
3008.300809.01.032	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	20,000,000.00
001	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	20,000,000.00

3008.300809.01.034	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	20,000,000.00
001	Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Kec. Jangkar	Jumlah Partisipasi keikutsertaan	1 kegiatan	20,000,000.00
3008.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Kec. Jangkar	Prosentase Peningnkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100 %	**217.946.241.00**
3008.300809.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	1 Paket	33.946.241.00
001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	1 Paket	33.946.241.00
3008.300809.02.010	Pengadaan Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis Mebeleur yang dibeli	1 Paket	20,000,000.00
001	Pengadaan Mebeleur	Kec. Jangkar	Jumlah jenis Mebeleur yang dibeli	1 Paket	20,000,000.00
3008.300809.02.014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Jangkar	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 rumah	10,000,000.00
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kec. Jangkar	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 rumah	10,000,000.00
3008.300809.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**Kec. Jangkar**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	24.000,000.00

001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	24.000,000.00
3008.300809.02.017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	10 unit	110,000,000.00
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Jangkar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	10 unit	110,000,000.00
3008.300809.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	4 jenis	10.000,000.00
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	4 jenis	10.000,000.00
3008.300809.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Perlengkapan yang terpelihara	4 jenis	10.000,000.00
001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Jangkar	Jumlah Jenis Perlengkapan yang terpelihara	4 jenis	10.000,000.00
3008.03	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Kec. Jangkar	**Peresentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu.**	100 %	**25.000.000.00**
3008.300809.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 laporan	3.000,000.00
001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 laporan	3.000,000.00
3008.300809.03.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan Semesteran yang disusun	1 laporan	3.000,000.00

001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan Semesteran yang disusun	1 laporan	3.000,000.00
3008.300809.03.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang disusn	1 laporan	3.000,000.00
001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang disusn	1 laporan	3.000,000.00
3008.300809.03.005	Penyusunan RKA dan DPA	**Kec. Jangkar**	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	**4 dokumen**	5.000,000.00
001	Penyusunan RKA dan DPA	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	**4 dokumen**	5.000,000.00
3008.300809.03.007	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun	**1 laporan**	5.000,000.00
001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun	**1 laporan**	5.000,000.00
3008.300809.03.017	Penyusunan Renstra SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	**1 dokumen**	3.000,000.00
001	Penyusunan Renstra SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	**1 dokumen**	3.000,000.00
3008.300809.03.018	Penyusunan Renja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun.	**2 dokumen**	3.000.000.00

001	Penyusunan Renja SKPD	Kec. Jangkar	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	**2 dokumen**	3.000.000.00
3008.19	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan**	Kec. Jangkar	Persentase Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100 %	**65.000.000.00**
3008.300809.19.001	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Pemohon Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yangn diproses sesuai SOP	700 orang	60.000.000.00
001	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Pemohon Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yangn diproses sesuai SOP	700 orang	60.000.000.00
3008.300809.19.002	Penyusunan IKM Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan IKM yang disusun	1 laporan	5,000,000.00
001	Penyusunan IKM Kecamatan	Kec. Jangkar	Jumlah Laporan IKM yang disusun	1 laporan	5,000,000.00
3008.20	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa**	Kec. Jangkar	Persentae Desa Pelaporan Keuangan Tertib, baik dan tepat waktu	100 %	**460.000.000.00**
			Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	
3008.300809.20.001	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Pemerintahan	24 rekomendasi	150,000,000.00

001	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Pemerintahan	24 rekomendasi	150,000,000.00
3008.300809.20.002	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Perekonomian dan Pembangunan	24 rekomendasi	110.000.000.00
001	Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Perekonomian dan Pembangunan	24 rekomendasi	110.000.000.00
3008.300809.20.003	Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	**Kec. Jangkar**	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Kesejahteraan Rakyat	24 rekomendasi	100.000.000.00
001	Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	**Kec. Jangkar**	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Kesejahteraan Rakyat	24 rekomendasi	100.000.000.00
3008.300809.20.004	Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Ketentraman dan Ketertiban umum	24 rekomendasi	100.000.000.00

001	Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa	Kec. Jangkar	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang Ketentraman dan Ketertiban umum	24 rekomendasi	100.000.000.00
	JUMLAH KECAMATAN JANGKAR				**1.021.746.241.00**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Jangkar Tahun 2021 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Jangkar 2016 - 2021 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Jangkar untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra SKPD (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Jangkar selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2021 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Jangkar Tahun 2021 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Jangkar pada periode Tahun 2021. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jangkar yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Jangkar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Jangkar. RENJA PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan tahun 2021, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Jangkar.

Jangkar , 28 Mei 2020

CAMAT JANGKAR

SAMSITO,S.Pd,M.Pd
Pembina
NIP. 196212151985031004